

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga sangat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan seringkali menyebabkan tingginya kematian bayi.

Tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Karenanya, Mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama. Hal ini karena meningkatnya resiko anak putus

sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan, mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Pada usia ini mereka rawan terjangkit HIV/AIDS. Kondisi sosial dan budaya di Indonesia ikut andil meningkatkan resiko tersebut, terutama terhadap para remaja putri.

Sebagai bagian dari anak Indonesia, anak penyandang disabilitas terutama dari keluarga miskin perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sebagian besar Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau hilangnya hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Lanjut usia rentan mengalami masalah fisik, mental, sosial, dan psikologis, sehingga dapat mengakibatkan gangguan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia

dari tahun ke tahun. Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan, pendamping PKH memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara rutin untuk tujuan perubahan perilaku yang lebih baik. Pendamping PKH bertugas untuk memastikan peserta PKH memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan layanan pendidikan sesuai ketentuan dan persyaratan. Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut melalui proses seleksi dan ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga peserta PKH penerima bantuan PKH. Peserta PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Dalam pelaksanaannya, P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator Kabupaten/Kota, dan koordinator wilayah. P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap Peserta PKH yang menjadi dampungannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. P2K2 PKH merupakan

proses belajar KSM PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak serta disabilitas dan lanjut usia. P2K2 adalah usaha meningkatkan kapasitas atau kemampuan keluarga dalam menjalani kehidupannya melalui proses belajar.

Pada akhirnya, impikasi positif dan pelaksanaan P2K2 PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan P2K2 PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka, P2K2 PKH membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Sumber daya manusia berguna dalam penguasaan teknologi dan menghasilkan produk yang berkualitas. Seberapa canggih teknologi yang dimanfaatkan oleh organisasi dalam menjalankan pekerjaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dari kemajuan suatu organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam bekerja. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang paling dinamis dalam suatu organisasi sehingga dibutuhkan berbagai cara dan upaya untuk terus adanya peningkatan dalam pengembangan sumber

daya manusia. Tindakan yang cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan sumber daya manusia, sehingga benar-benar menjadi aset yang produktif dan bermanfaat.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam P2K2 PKH maka diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang ditujukan kepada seluruh pelaksana PKH baik Pusat maupun Daerah. Diklat P2K2 PKH bertujuan untuk memahami Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif perlindungan sosial dalam kaitan dengan tujuan P2K2 PKH, menjelaskan manfaat P2K2 bagi peningkatan kemampuan keluarga sangat miskin dalam memutus kemiskinan, menjelaskan dan mempraktekkan teknik-teknik fasilitasi dalam proses pembelajaran, memiliki motivasi yang tinggi dalam memfasilitasi pendamping PKH, menjelaskan dan mempraktekkan manfaat kesehatan, pendidikan dan ekonomi, perlindungan anak serta disabilitas dan lanjut usia. Di dalam suatu organisasi, unit atau bagian yang mempunyai tugas untuk pengembangan tenaga ini biasanya unit pendidikan dan pelatihan pegawai. Di tingkat departemen pemerintah, unit ini disebut dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

Diklat merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta meningkatkan kinerja pegawai. Pendidikan dan pelatihan berupaya mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai. Oleh

karena itu setiap organisasi yang ingin berkembang harus benar-benar memperhatikan pendidikan dan pelatihan pegawai sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Oleh karena itu, sasaran diklat adalah terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Salah satu alat yang dipakai untuk meningkatkan kompetensi adalah melalui penyediaan kurikulum. Kurikulum merupakan alat mencapai suatu tujuan dan membutuhkan keandalan penggunaannya. Kurikulum akan menjadi dasar bagi pengajar/widyaiswara serta lembaga diklat untuk mengembangkan materi diklat. Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan dan pelatihan merupakan suatu alat yang sangat membantu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu program pendidikan dan pelatihan.

Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan kurikulum pendidikan dan pelatihan, maka perlu dilakukan manajemen yang baik berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Manajemen kurikulum yaitu kegiatan yang berhubungan dengan upaya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses belajar

mengajar agar dapat berjalan secara efektif. Manajemen kurikulum sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan. Jika manajemen kurikulum tidak berjalan dengan baik maka proses belajar mengajar tersebut akan mengalami hambatan sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui proses belajar mengajar juga terkendala. Sebaliknya, jika manajemen kurikulum telah ditata dengan baik kondisi akan kondusif untuk pengembangan proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan hasil *grandtour* diperoleh informasi bahwa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. Salah satu fungsi Pusdiklat Kesejahteraan Sosial adalah penyusunan rencana dan program serta anggaran pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Dalam fungsi penyusunan program perlu menentukan kurikulum diklat yang didasarkan pada hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Analisis Diklat (AD) dan dilengkapi dengan kurikulum, modul serta pedoman. sehingga salah satu tugas Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu menyusun, merancang dan mengembangkan kurikulum, modul dan pedoman diklat kesejahteraan sosial meliputi rumpun dan jenis diklat fungsional maupun teknis bagi sumber daya manusia kesejahteraan

sosial yakni pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial.

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial bertugas menyusun, merancang dan mengembangkan kurikulum, modul dan pedoman diklat P2K2 PKH. Hingga saat ini program P2K2 PKH masih berjalan dan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial masih mengadakan Diklat TOT P2K2 PKH. Untuk terus meningkatkan kualitas Diklat TOT P2K2 PKH Pusdiklat Kesejahteraan Sosial terus mengembangkan kurikulum, modul dan pedoman hampir setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah, survei kebutuhan masyarakat, riset, pengalaman negara-negara lain dan perkembangan jaman. Terlihat dari hampir setiap tahunnya Pusdiklat Kesejahteraan Sosial melakukan analisis kebutuhan diklat untuk menyiapkan informasi yang cocok atau tidak untuk pengembangan pembelajaran dan melakukan studi kelayakan dan kebutuhan pengembang kurikulum, modul dan pedoman dengan melakukan kegiatan-kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan, yaitu hal-hal apa yang dirasanya perlu untuk dikembangkan dalam Diklat TOT P2K2 PKH dan modul Diklat TOT P2K2 PKH mengalami pengembangan isi, materi dan bidang kajiannya sehingga sering mengadakan uji coba modul dan seminar modul. Hingga saat ini tahun 2016 modul Diklat TOT P2K2 PKH mencakup 6 bidang yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan

keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan anak, disabilitas dan lanjut usia. Yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya mencakup 4 bidang saja. Terlihat hampir setiap tahunnya Pusdiklat Kesejahteraan Sosial mengembangkan kurikulum, modul dan pedoman maka adanya proses pengorganisasian yang berhubungan erat dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan yang baik setiap tahunnya. Kegiatan manajemen kurikulum di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat sebagai penanggung jawab keseluruhan pusdiklat dan kuasa pengguna anggaran, kepala bidang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksana diklat dan kepala subbidang kerjasama dan pengembangan diklat kesejahteraan sosial masyarakat beserta widyaiswara sebagai pelaksana pengembangan/penyempurnaan kurikulum, modul dan pedoman diklat kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaku pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan oleh sekretariat penyelenggara, praktisis, konsultan maupun proyek-proyek yang tertuang dalam program kegiatan. Karena peranan dari manajemen kurikulum ini sangat penting maka para pelaksana dituntut memiliki wawasan dan kemampuan bidang tersebut. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum karena adanya ilmu pengetahuan baru, masyarakat, sistem, nilai, artikulasi kurikulum (kesatupaduan dan koordinasi semua pengalaman belajar).

Oleh karena itu kurikulum menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan kemampuan sumber daya manusia atau sasaran diklat. Dan Manajemen Kurikulum sebagai sistem pengelolaan kurikulum. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial juga mendapatkan sertifikasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melaksanakan diklat aparatur pemerintah maupun diklat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melihat, menggambarkan dan menganalisis Manajemen Kurikulum Diklat *Training Of Trainer* Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan (TOT P2K2 PKH) yang ada di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Khususnya yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum diklat.

Dengan demikian judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **Manajemen Kurikulum Diklat *Training Of Trainer* Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan (TOT P2K2 PKH) di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada Manajemen Kurikulum Diklat *Training Of Trainer* Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan (TOT P2K2 PKH) di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun sub fokus penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus peneliatan yang telah di uraikan di atas, dapat di ajukan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia?

D. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris serta mengamati secara langsung Manajemen Kurikulum Diklat *Training Of Trainer* Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan (TOT P2K2 PKH) di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan khususnya terkait dengan pengembangan konsep Manajemen Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Sosial dan untuk memberikan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan untuk mendalami dan mengembangkan konsep-konsep tentang manajemen kurikulum diklat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum diklat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi organisasi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bermanfaat bagi kepala pusdiklat dalam meningkatkan pertimbangan pengelolaan dan kompetensi dalam manajemen kurikulum diklat di Pusdiklat

Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan fungsinya dalam manajemen kurikulum diklat untuk selalu membina dan memberi arahan dalam melaksanakan kegiatan diklat.

- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman peneliti setelah melakukan pengamatan langsung Manajemen Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti setelah membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.
- c. Civitas akademika, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik yang sama.